

## Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Afi Satrio Wicaksono\*, Suharto

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: 17313118@students.uii.ac.id

---

**JEL Classification Code:**

M30, M32, N41

**Kata kunci:**

Kriminalitas, Kemiskinan, Pendidikan

**Email penulis:**

933130104@uui.ac.id

**DOI:**

10.20885/JKEK.vol2.iss1.art6

**Abstract**

**Objective** – This study aims to analyze the effect of economic factors on crime in the District/City of the Special Region of Yogyakarta

**Methods** – This study used secondary data collected from the DIY Regional Police, Bappeda and BPS. The analytical method in this study uses panel data regression which produces the best model, namely the fixed effect.

**Findings** - The results of the study show that the variables of poverty and education have a positive and significant effect on the amount of crime in the Regency/City of the Special Region of Yogyakarta while the variables of GRDP per capita and unemployment do not have a significant effect on the crime rate in the Regency/City of the Special Region of Yogyakarta.

**Implication** – The government needs to control poverty and improve education so that the crime rate in DIY will decrease

**Originality** – This study focuses on analyzing the influence of economic factors on crime in the District/City of the Special Region of Yogyakarta

---

**Abstrak**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

**Metode** – Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil melalui Polda DIY, Bappeda, dan BPS. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang menghasilkan model terbaik yaitu fixed effect.

**Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan variabel PDRB per kapita dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kriminalitas yang ada di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

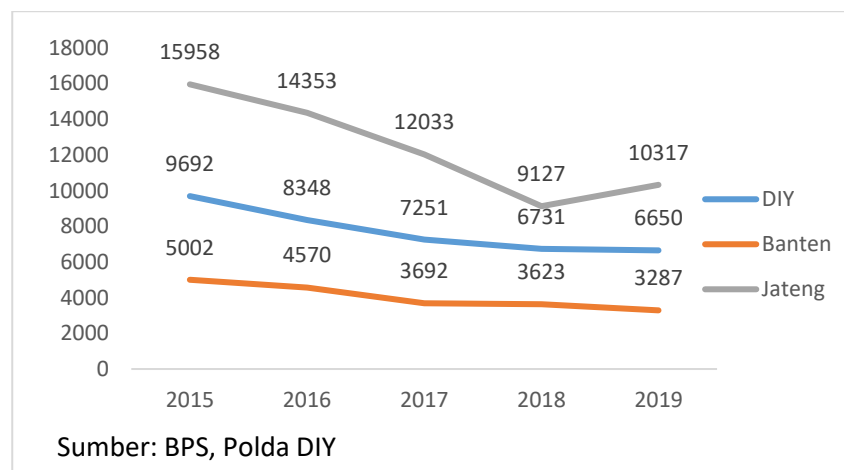
**Implikasi** – Pemerintah perlu mengendalikan kemiskinan dan meningkatkan pendidikan agar tingkat kriminalitas di DIY semakin menurun

**Orisinalitas** – Penelitian ini focus untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

---

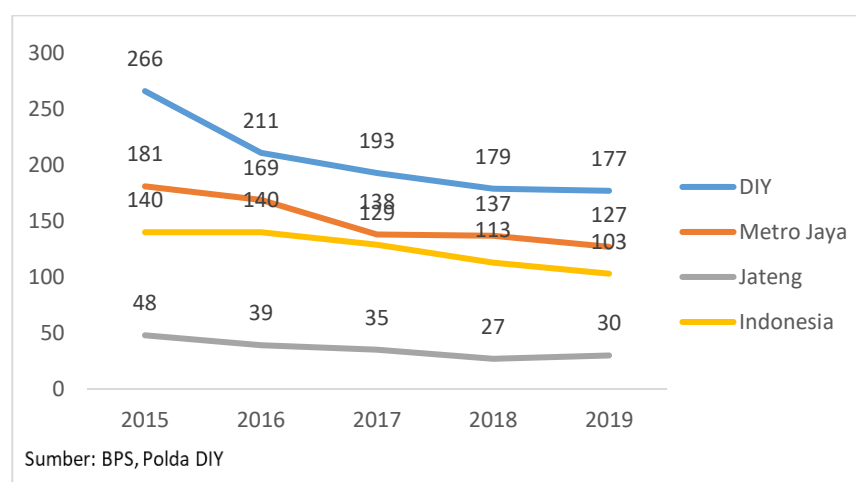
## Pendahuluan

Perkembangan zaman menyebabkan kehidupan masyarakat semakin kompleks. Hadirnya teknologi yang berkembang secara signifikan mampu menciptakan proses urbanisasi dengan kondisi lingkungan masyarakat yang modern sehingga perlu melakukan adaptasi. Kesulitan dalam beradaptasi menyebabkan masyarakat modern merasa cemas dan kebingungan. Selain itu, ambisi yang tinggi oleh masyarakat modern dalam memperoleh materi melimpah tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang. Adanya keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan materiil yang melimpah, memiliki kekayaan dan harta yang mewah namun tidak mempunyai keterampilan yang wajar untuk memperolehnya. Ketidaksesuaian antara ambisi dengan kemampuan pribadi inilah yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal (Maulana, 2014).



**Gambar 1.** Jumlah Kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu masalah sosial yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pada tahun 2015-2019 jumlah kriminalitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 38.672 kasus. Berdasarkan grafik di atas angka kriminalitas Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dan menempati peringkat 2 terendah se-Pulau Jawa.



**Gambar 2.** Risiko Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk

Berbanding terbalik jika diukur berdasarkan tingkat risiko terkena kejahatan. Pada tahun 2015 risiko terkena kejahatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat 6 nasional dengan nilai sebesar 266 yang berarti setiap 100.000 penduduk kira-kira sebanyak 266 orang berisiko terkena tindak kejahatan. Meskipun terus mengalami penurunan menjadi 177 pada tahun 2019 namun tingkat risiko kejahatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih merupakan

yang tertinggi se-Pulau Jawa. Masalah ini berbanding terbalik dengan salah satu slogan yang sangat sering didengar yaitu “Jogja Berhati Nyaman”.

Rasa aman dan nyaman termasuk salah satu bentuk hak asasi manusia seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28G ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Rasa aman dan nyaman juga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia”.

Kepolisian selaku penegak hukum diberikan amanat yang tertulis dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum untuk mengurangi dan mencegah tindak kejahatan perlu diapresiasi. Namun tingkat risiko terkena kejahatan yang sangat tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu perhatian lebih. Bahkan bukan tidak mungkin masih terdapat tindakan kejahatan yang lolos dari pengamatan aparat penegak hukum dan tidak dilaporkan oleh korban.

Banyak upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum untuk mengurangi angka kriminalitas mulai dari pencegahan hingga pemberian hukuman bagi para pelaku kejahatan. Upaya pencegahan tindak kejahatan juga dapat diimplementasikan kedalam indikator-indikator ekonomi. Seperti yang sering ditemui melalui televisi, koran, maupun internet yang menyebutkan bahwa pelaku tindak kriminal mengakui aksinya tersebut karena permasalahan ekonomi mulai dari pengangguran, kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi, hingga kemiskinan.

Menurut ekonomi makro Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai gambaran tentang kondisi perekonomian di suatu wilayah. Nilai PDRB apabila dibagi dengan jumlah penduduk maka dapat menjadi gambaran tingkat pengeluaran tiap penduduk. Maka tidak jarang PDRB per kapita dijadikan tolak ukur kesejahteraan dan indikator pembangunan. Dalam penelitian ini PDRB per kapita dapat dikaitkan dengan masalah kriminalitas. Semakin tinggi pengeluaran penduduk maka tingkat kesejahteraan penduduk makin tinggi sehingga angka kriminalitas akan menurun.

Kriminalitas dapat juga dikaitkan dengan pengangguran. Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lapangan kerja yang terbatas membuat seseorang harus menganggur. Utari (2012) beranggapan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan apa adanya bahkan menganggur dapat menimbulkan kepribadian jahat atau penyakit moral untuk mencapai suatu keinginannya. Adanya tekanan yang kuat dari faktor psikologis para pelaku kejahatan yang disebabkan karena tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila pengangguran tidak teratasi dapat menyebabkan masalah baru yaitu antara lain kemiskinan.

Kriminalitas dapat juga dikaitkan dengan pengangguran. Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lapangan kerja yang terbatas membuat seseorang harus menganggur. Utari (2012) beranggapan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan apa adanya bahkan menganggur dapat menimbulkan kepribadian jahat atau penyakit moral untuk mencapai suatu keinginannya. Adanya tekanan yang kuat dari faktor psikologis para pelaku kejahatan yang disebabkan karena tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila pengangguran tidak teratasi dapat menyebabkan masalah baru yaitu antara lain kemiskinan.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Hardianto (2009) untuk kasus Indonesia yang menyimpulkan jumlah terdakwa/tertuduh tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminal. Variabel tingkat upah, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminal. Pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kriminal. Penelitian lain oleh Rusnani (2015) tentang kemiskinan dan meningkatnya kriminalitas di Sumenep menunjukkan bahwa

pendidikan rendah, kesehatan rendah, lapangan kerja terbatas, dan kondisi terisolasi berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas di Sumenep. Sementara itu, Purwanti dan Widyaningsih (2019) tentang faktor ekonomi dan kriminalitas di Jawa Timur menggunakan regresi data panel menyimpulkan bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas, kepadatan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Khairani dan Ariesa (2019) faktor tingkat kriminalitas di Sumatera Utara dengan Pendekatan Ekonomi menunjukkan bahwa pendidikan, pengangguran, PDRB, dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Beberapa variabel independen yang diteliti belum maksimal kualitasnya sehingga belum bisa mempengaruhi tindak kriminal dan terdapat faktor lain yang bisa mengakibatkan terjadinya tindak kriminal.

Selain faktor ekonomi di atas, kriminalitas juga erat kaitannya dengan masalah sosial. Tak terkecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki julukan sebagai “kota pelajar/kota pendidikan” karena terdapat banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi unggulan yang diyakini dapat membangun kualitas seseorang seperti tingkah laku yang baik dan tidak menyimpang dari norma di masyarakat sehingga pendidikan dapat dijadikan patokan dalam pengaruhnya dengan tingkat kriminalitas. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka tingkah laku mereka akan lebih baik sehingga secara sadar meyakini tindakan kriminal merupakan perilaku yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Tingginya pendidikan mencerminkan kualitas seseorang dan menjadi nilai tambah untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan kriminalitas.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder ruang lingkup kabupaten atau kota periode tahun 2015-2019 yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh dari Kepolisian, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan sumber-sumber lain. Analisis yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Data panel sendiri merupakan gabungan dari metode data *time series* dan *cross section*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kriminalitas, PDRB per Kapita, Pengangguran, Kemiskinan dan Pendidikan yang secara detail ditunjukkan pada table dibawah ini:

**Tabel 1.** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi	Satuan
Kriminalitas	Y	Jumlah kriminalitas yang terlapor di setiap kabupaten dan kota	Kasus
PDRB per Kapita	X1	PDRB atas harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk	Juta Rupiah
Pengangguran	X2	Persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di setiap kabupaten dan kota	Persen
Kemiskinan	X3	Jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten dan kota	Jiwa
Pendidikan	X4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di setiap kabupaten dan kota	Tahun

Penelitian ini menggunakan model Panel Data dengan model sebagai berikut:

$$\text{Log } Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } X_{1it} + \beta_2 \text{Log } X_{2it} + \beta_3 \text{Log } X_{3it} + \beta_4 \text{Log } X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Terdapat tiga pendekatan dalam analisis data panel, yaitu:

### 1. Model Common Effect

Pendekatan ini merupakan yang paling sederhana karena hanya menyatukan data cross section dan time series dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Dalam pendekatan ini dimensi individu dan waktu tidak diperhatikan. (Widarjono, 2018)

### 2. Model Fixed Effect

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep dalam rumus persamaan. Fixed Effect adalah teknik estimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk mendapatkan perbedaan intersep.

### 3. Model Random Effect

Pendekatan Random Effect digunakan karena pendekatan Fixed Effect mempunyai masalah seperti berkurangnya derajat keyakinan (degree of freedom) yang menyebabkan efisiensi parameter berkurang. pendekatan Random Effect dapat mengestimasi variabel gangguan yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

## Hasil dan Pembahasan

Proses awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan model terbaik yang ditunjukkan dari hasil uji pemilihan model yaitu Chow-Test dan Hausman Test. Hasil tes tersebut ditunjukkan pada table dibawah ini.

**Tabel 1.** Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Chow Test			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	5,517384	(4,11)	0.0110
Cross-section Chi-square	22,014344	4	0.0002
Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	22.069536	4	0.0002

Berdasarkan hasil uji chow di atas maka diperoleh nilai prob. cross section F sebesar 0,0110 ( $\text{prob} < 0,05$ ) sehingga menolak  $H_0$  yang berarti bahwa model yang tepat adalah fixed effect. Berdasarkan hasil uji hausman di atas maka diperoleh nilai prob. sebesar 0,0002 ( $\text{prob} < 0,05$ ) sehingga menolak  $H_0$  yang berarti bahwa model yang tepat adalah fixed effect. Setelah melakukan estimasi untuk menentukan model yang tepat dengan uji chow dan uji hausman maka dapat disimpulkan bahwa model fixed effect merupakan model terbaik untuk menentukan model regresi.

**Tabel 2.** Hasil Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-61.98610	29.81778	-2.078831	0.0618
LOGX1	1.248891	1.620386	0.770737	0.4571
LOGX2	0.350601	0.306228	1.144900	0.2766
LOGX3	4.006987	1.693869	2.365583	0.0374
LOGX4	8.381784	3.748672	2.235934	0.0470
R-Squared	0.964781		F-Statistic	37.66674
Adj R-Squared	0.939168		Prob (F-Stat)	0.000001

Berdasarkan uji T statistik di atas dapat dijelaskan bahwa variabel PDRB per kapita nilai koefisien 1,248891 dan nilai probabilitas 0,4571  $>$  (0,05) yang berarti PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota DIY. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa PDRB per kapita berpengaruh terhadap kriminalitas. Sementara itu variabel pengangguran memiliki nilai koefisien sebesar 0,350601 dan nilai probabilitas 0,2766  $>$  (0,05) yang berarti bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota DIY. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas.

Variabel kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota DIY. Nilai koefisien sebesar 4,006987 berarti jika kemiskinan naik sebesar 1% maka kriminalitas di Kabupaten/Kota DIY mengalami kenaikan sebesar 4,00% kasus. Nilai prob sebesar 0,03764  $<$   $\alpha$  (0,05) berarti kenaikan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Kemiskinan (faktor ekonomi) berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Sikap-sikap yang salah dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup cenderung melakukan apapun meskipun itu tindakan kejahatan.

Adanya perasaan iri penduduk kelas menengah kebawah melihat pendapatan penduduk lain yang berada di atas mereka menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan. Ilmu kriminologi menganggap bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan bentuk kekerasan struktural hingga menimbulkan korban. Nurkse (dalam Kuncoro, 1997) pada teori *vicious circle of poverty* beranggapan bahwa “sebuah negara miskin itu miskin karena mereka miskin”. Apabila diimplementasikan pada skala mikro maka penduduk miskin itu miskin karena mereka miskin.

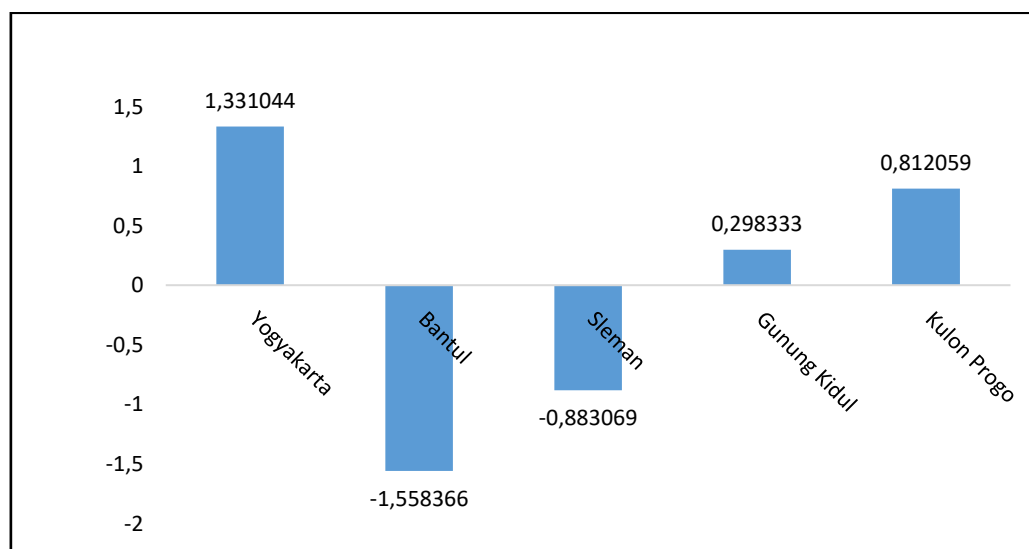
Kemiskinan tidak memiliki pangkal dan ujung. Rendahnya kualitas SDM (Produktivitas rendah) membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan sehingga berakibat pada rendahnya kualitas hidup penduduk. Kualitas hidup rendah ditandai dengan terbatasnya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Apabila masalah kemiskinan tidak diatasi akan berdampak pada terganggunya stabilitas sosial, salah satunya meningkatnya angka kejahatan

Teori anomie menurut Merton (dalam Utari, 2012) menjelaskan bahwa perbedaan dalam mencapai tujuan disebabkan karena adanya struktur sosial di masyarakat. Dalam mencapai tujuan, masyarakat kelas bawah (*lower class*) memiliki kesempatan lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat kelas atas (*upper class*). Mereka yang mengalami perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan berdampak pada frustrasi di kalangan warga kelas bawah sehingga mengakibatkan timbulnya penyimpangan.

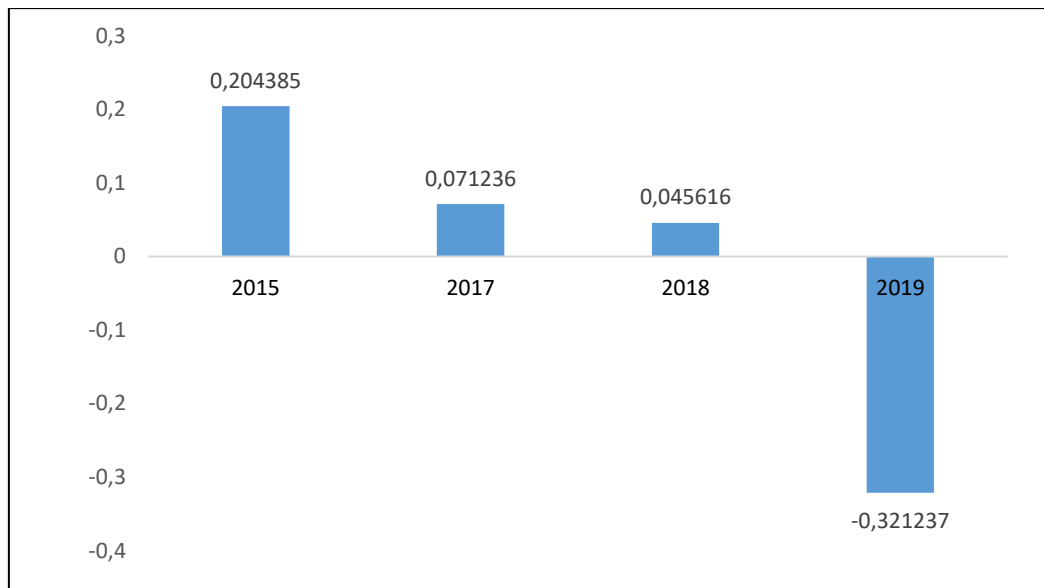
Berdasarkan uji T statistik di atas dapat dijelaskan bahwa variabel pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota DIY. Nilai koefisien sebesar -8,381784 berarti jika rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 1% maka kriminalitas di Kabupaten/Kota di DIY mengalami kenaikan sebesar 8,38% kasus. Nilai probabilitas sebesar  $0,0470 < \alpha (0,05)$  berarti kenaikan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas.

Hasil penelitian ini menjadi gambaran bahwa pendidikan tinggi yang menjadi tolak ukur kecerdasan, berperilaku mulia, beragama, dapat mengendalikan diri kecerdasan, dan dapat meningkatkan keterampilan belum tentu membuat angka kriminalitas menurun. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh (Nadilla & Farlian, 2018) dimana pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh.

Nilai konstanta dalam analisis cross effect masing-masing Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa angka kriminalitas tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 1,331044 dan angka kriminalitas terendah berada di Kab. Bantul sebesar -1,558366. Berdasarkan hasil intersep *period effect* menunjukkan bahwa pada tahun 2015 angka kriminalitas sebesar 0,204385. Dalam waktu 5 tahun angka kriminalitas di DIY mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka kriminalitas di DIY sebesar -0,321237.



Gambar 3. Hasil Cross Section Effect



**Gambar 4.** Hasil Period Effect

## Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan pengujian data panel dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pendekatan ekonomi maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap kriminalitas. Hal ini berarti PDRB per kapita yang menjadi gambaran pengeluaran penduduk tidak dapat dijadikan tolak ukur tindakan kriminal. Sehingga hipotesis ditolak.
2. Variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kriminalitas. Angkatan kerja yang tidak bekerja bukan berarti mereka sepenuhnya menganggur. Mereka bisa saja sedang mencari pekerjaan baru, setengah menganggur, atau pekerja sektor pertanian yang sedang menunggu hasil panen.
3. Variabel kemiskinan memiliki positif signifikan terhadap kriminalitas. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, perbedaan peluang dalam meraih tujuan, perbedaan dalam menikmati fasilitas publik yang dialami penduduk miskin dapat membuat mereka frustrasi dan cenderung akan melakukan perbuatan menyimpang.
4. Variabel pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas. Perkembangan zaman teknologi dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminal yang lebih pintar.

## Daftar Pustaka

- Kuncoro, M. (1997), *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Maulana, T. (2014), *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Dengan Pendekatan Ekonomi*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nadilla, U & Farlian, T. (2018), Pengaruh PDRB per kapita, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Polisi Terhadap Angka Kriminalitas di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.3 No.1.
- Utari, I.S. (2012), *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta
- Khairani, R & Ariesa, Y. (2019), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatra Utara (Pendekatan Ekonomi)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 2.

- Hardianto, F.N. (2009), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi” *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Unpas*, Vol. 13, No. 2. p. 28-41.
- Purwanti, E. Y. & Widyaningsih, E. (2019), “Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur”, *JEQu*, Vol.9 No.2.
- Rusnani. (2015), “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas di Kabupaten Sumenep”, *PERFORMANCE*, Vol. V, No.1.